

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dikerjakan guna menelaah sejauh mana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan selama periode 2010–2024. Berdasarkan hasil analisis data panel dengan metode Pooled Least Squares serta kajian teoritis dan empiris, maka dapat disimpulkan yang pertama meskipun secara teoritis Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif terhadap TPAK sebagaimana dinyatakan dalam Human Capital Theory oleh Gary S. Becker, hasil empiris menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik dalam kasus Pulau Madura. Hal ini menandakan bahwa peran pendidikan belum sepenuhnya dioptimalkan dalam mendorong peningkatan partisipasi kerja.

Meskipun angka RLS mencatat kenaikan setiap tahun di berbagai kabupaten di Pulau Madura, fenomena fluktuasi TPAK mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan saja belum cukup. Faktor-faktor lain seperti keterbatasan lapangan kerja formal, ketidaksesuaian keterampilan, dan dominasi sektor informal menjadi kendala utama dalam mengkonversi pendidikan menjadi partisipasi kerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi lanjutan, seperti penguatan link-and-match antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lokal, pengembangan sektor formal yang menyerap tenaga kerja berpendidikan, serta pelatihan kerja

berbasis kompetensi agar hasil pendidikan bisa lebih produktif dan relevan secara ekonomi.

Kedua, variabel Usia Harapan Hidup terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di Pulau Madura. Temuan ini selaras dengan kerangka teori investasi modal manusia yang menyatakan bahwa peningkatan usia harapan hidup mendorong individu untuk tetap aktif di pasar kerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peningkatan angka UHH mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang secara langsung mendukung peningkatan partisipasi kerja, baik dari sisi durasi usia bekerja maupun kesiapan fisik dan mental untuk bekerja secara produktif. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah bahwa investasi dalam sektor kesehatan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, akan tetapi menjadi strategi jangka panjang dalam memperkuat basis tenaga kerja dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan ekonomi juga.

Ketiga, hasil studi menjelaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK. Artinya, peningkatan UMK justru cenderung menurunkan partisipasi kerja, terutama di wilayah yang didominasi oleh sektor informal dan memiliki keterbatasan industri formal seperti Pulau Madura. Kenaikan UMK dapat menyebabkan beban finansial bagi usaha kecil dan menengah, yang berakibat pada pembatasan perekrutan tenaga kerja baru. Selain itu, fenomena migrasi keluar daerah untuk mencari upah lebih tinggi di kota besar juga menjadi penyebab penurunan TPAK lokal. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan upah minimum harus mempertimbangkan struktur ekonomi daerah dan diiringi dengan kebijakan pelengkap, seperti pengembangan industri

padat karya, pembukaan lapangan kerja baru, dan peningkatan daya saing tenaga kerja lokal agar dapat mendorong partisipasi kerja secara efektif dan merata.

## **5.2 Implikasi**

### **1) Implikasi Teoritis**

Hasil studi ini memperkuat teori Human Capital oleh Gary S. Becker yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan partisipasi kerja. Namun, temuan terkait pengaruh RLS yang tidak signifikan juga menjadi catatan penting bahwa hubungan antara pendidikan dan ketenagakerjaan bersifat kontekstual. Artinya, peningkatan pendidikan tidak serta-merta berdampak pada partisipasi kerja jika tidak didukung oleh struktur ekonomi dan pasar kerja yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kebijakan upah tidak selalu berdampak positif terhadap partisipasi kerja. Pengaruh negatif dari UMK terhadap TPAK menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan upah sangat bergantung pada karakteristik ekonomi lokal.

### **2) Implikasi Praktis**

Hasil penelitian ini punya implikasi praktis yang luas. Bagi pemerintah daerah, temuan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya serap sektor formal serta memperluas lapangan kerja di tingkat lokal. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi pada sumber daya manusia dapat diimbangi dengan penciptaan peluang kerja yang memadai. Sementara itu, bagi dunia usaha, hasil penelitian ini dapat

digunakan untuk mengevaluasi strategi pengupahan dan perekrutan agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial lokal. Selain itu, pelaku industri diharapkan dapat membangun kemitraan dengan dunia pendidikan guna memastikan tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan tuntutan sektor produktif.

Bagi masyarakat, temuan ini memberikan pemahaman bahwa peningkatan kualitas diri melalui pendidikan dan kesehatan harus diiringi dengan penguasaan keterampilan yang relevan dan aplikatif agar memiliki daya saing di tengah pasar kerja yang kian kompetitif. Dengan demikian, keterlibatan aktif dari ketiga pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam mendorong pertumbuhan partisipasi tenaga kerja secara berkelanjutan di Pulau Madura.

### **5.3 Saran**

Mengacu pada temuan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberi beberapa saran yakni:

#### **1. Penguatan Keterkaitan antara Pendidikan dan Dunia Kerja**

Diperlukan perumusan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Program pelatihan kerja, kurikulum berbasis keterampilan, serta link and match antara sekolah/kampus dengan industri harus diperkuat. Hal ini untuk memastikan bahwa peningkatan pendidikan benar-benar dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja secara nyata.

#### **2. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan**

Pemerintah daerah harus terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah pedesaan. Kesehatan masyarakat yang terjaga menjadi modal penting dalam memperpanjang usia produktif

masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis tenaga kerja yang sehat dan siap kerja.

### 3. Evaluasi Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum

Dalam merancang kebijakan upah minimum, perlu mempertimbangkan daya serap sektor usaha lokal, terutama sektor informal. Kenaikan UMK sebaiknya dibarengi dengan kebijakan pendukung, seperti insentif usaha dan kemudahan perizinan agar pelaku usaha mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis mereka.

### 4. Pengembangan Industri dan Sektor Formal di Wilayah Madura

Pemerintah perlu mendorong masuknya investasi di sektor-sektor strategis seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, logistik, dan pariwisata berbasis lokal. Pengembangan kawasan industri terpadu di Madura akan meningkatkan peluang kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang minim jaminan kerja.

### 5. Penelitian Lanjutan

Pengembangan studi ini bisa dilaksanakan seperti menambahkan variabel lain seperti tingkat urbanisasi, migrasi, partisipasi gender, serta menggunakan metode panel dinamis untuk menangkap pengaruh jangka panjang. Penelitian kualitatif juga disarankan guna memahami preferensi kerja masyarakat Madura secara mendalam.